

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI
KAB. KEDIRI KELAS IA**

**TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	21
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	22
3.5 Hasil Survei Kualitatif	23
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi.....	26
LAMPIRAN	27
KUESIONER	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, telah disusun Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA triwulan IV tahun 2023 ini.

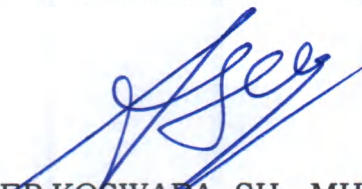
Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan public yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

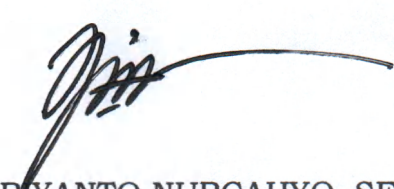
Semoga hasil Survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA triwulan IV tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pembina Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri


ASEP KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19681208 199403 1 001

Kediri, 02 Januari 2024
Ketua Tim.


GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., SH.
NIP. 19790920 200604 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi siSUPER.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalamkuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telahdisediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitasresponden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

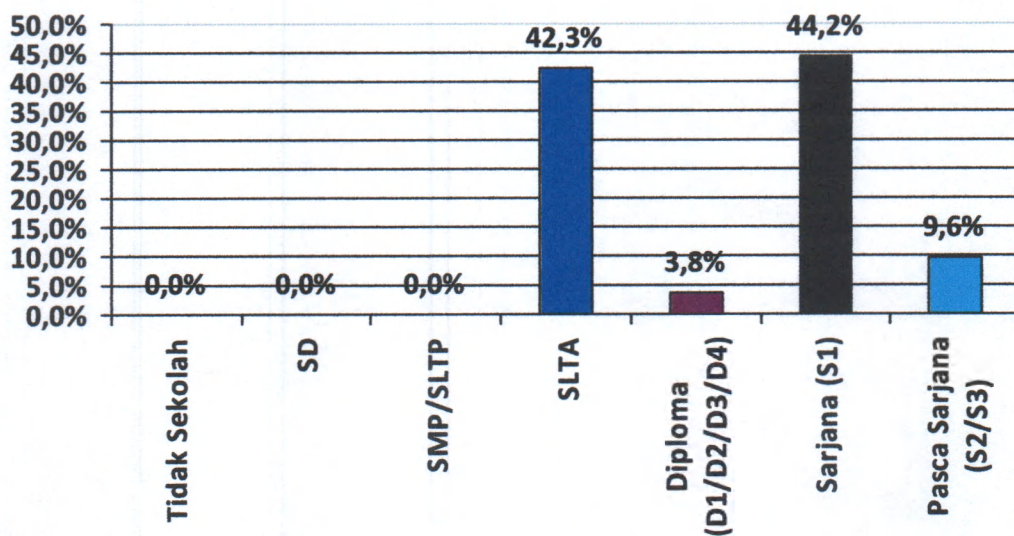
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki terakhir Strata-1 (S1) adalah 23 responden dengan persentase 44,2 %.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP / SLTP	0	0
4	SLTA	22	42,3
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	2	3,8
6	Sarjana (S1)	23	44,2
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	5	9,6
Jumlah		52	100.0

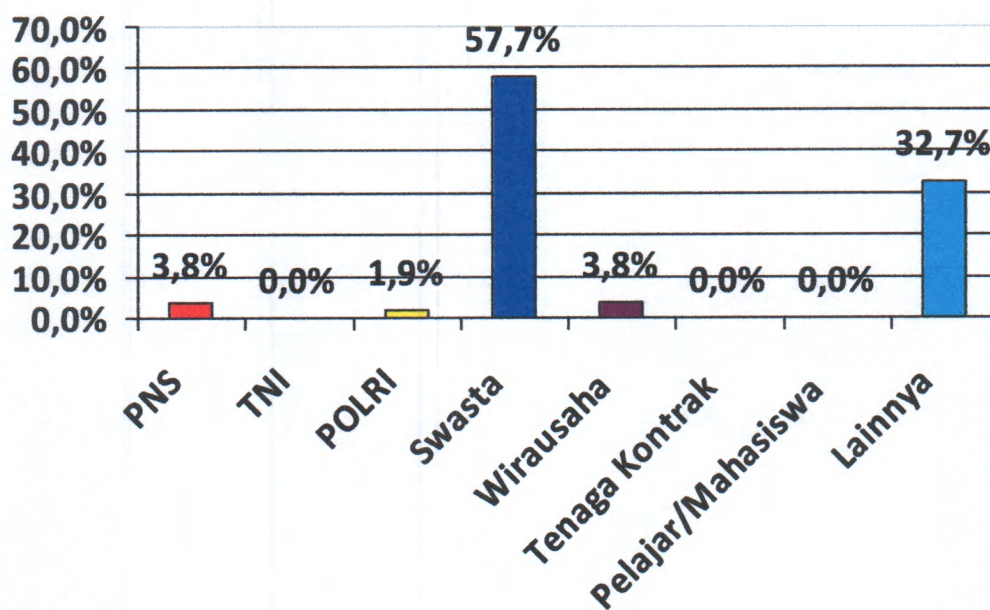


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 57,7 % atau sebanyak 30 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Swasta .

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	3,8
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	1,9
4	Swasta	30	57,7
5	Wirausaha	2	3,8
6	Tenaga Kontrak	0	0,0
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,0
8	Lainnya	17	32,7
Jumlah		52	100.0

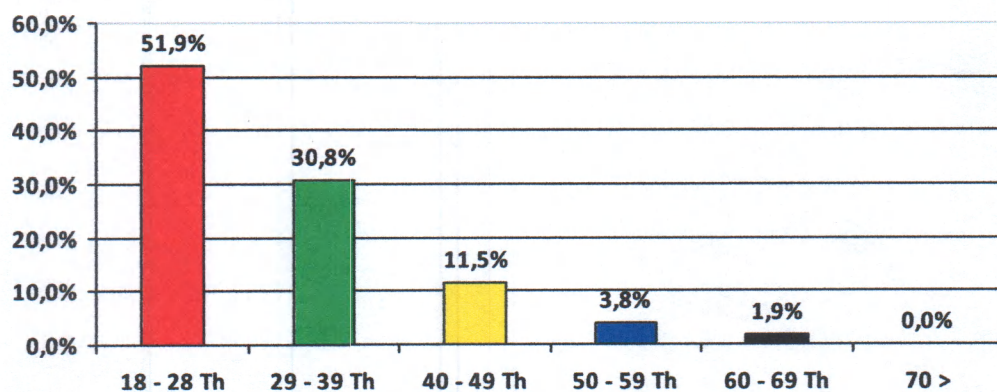


3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun yaitu sebanyak 27 responden atau sebesar 51,9 %. Bagi kelompok usia di atas 28 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28 Th	27	51,90
2	29 – 39 Th	16	30,80
3	40 – 49 Th	6	11,50
4	50 – 59 Th	2	3,80
5	60 - 69 Th	1	1,90
6	70>	0	0
Jumlah		52	100.0



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

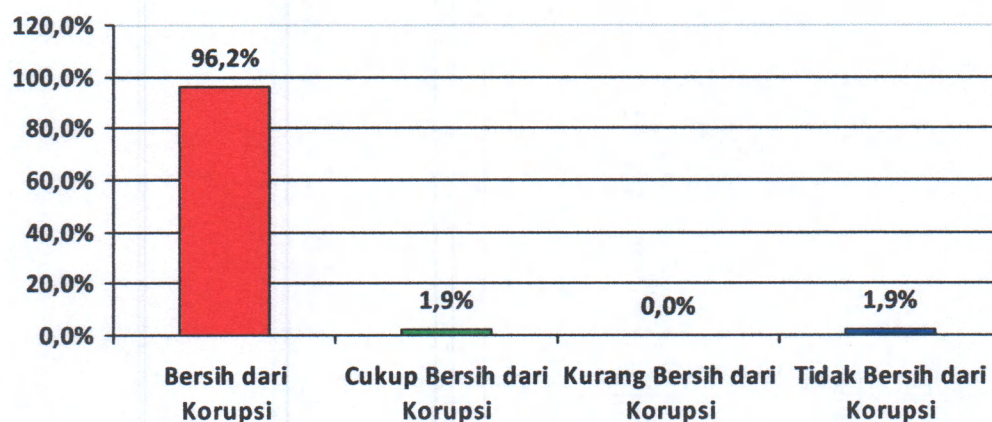
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,923

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	50	96,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	1	1,9
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.

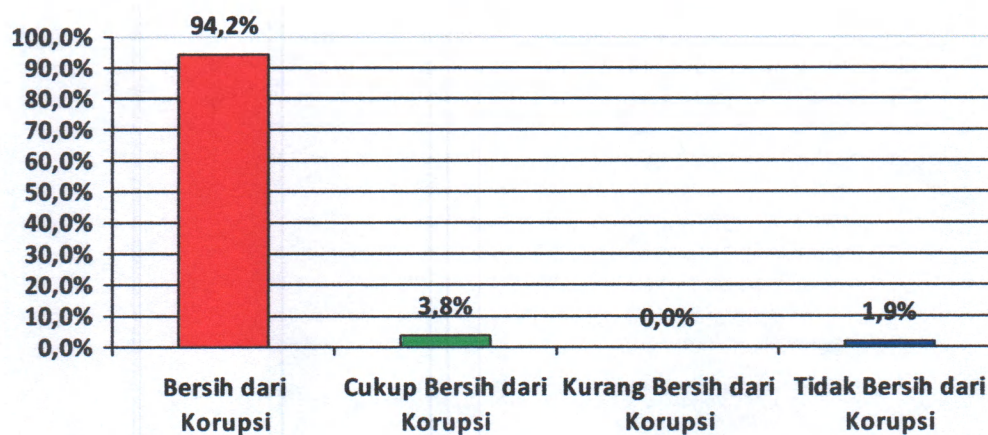
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,904

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh.

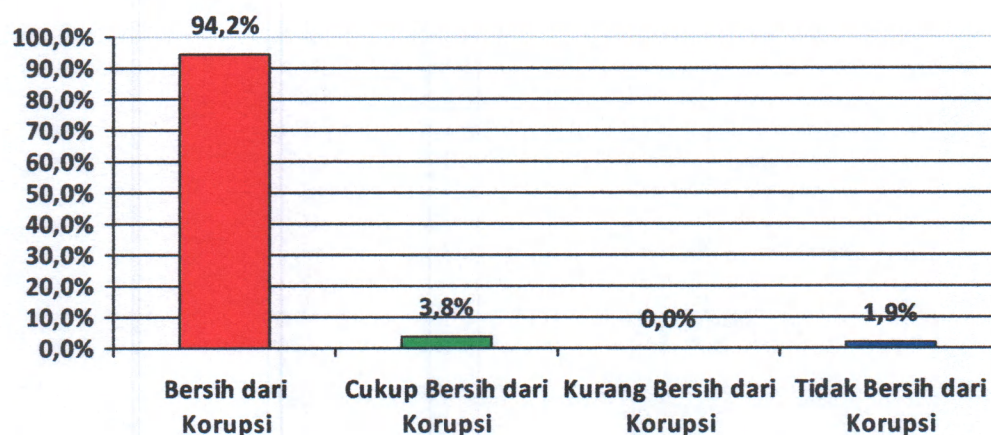
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,904

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

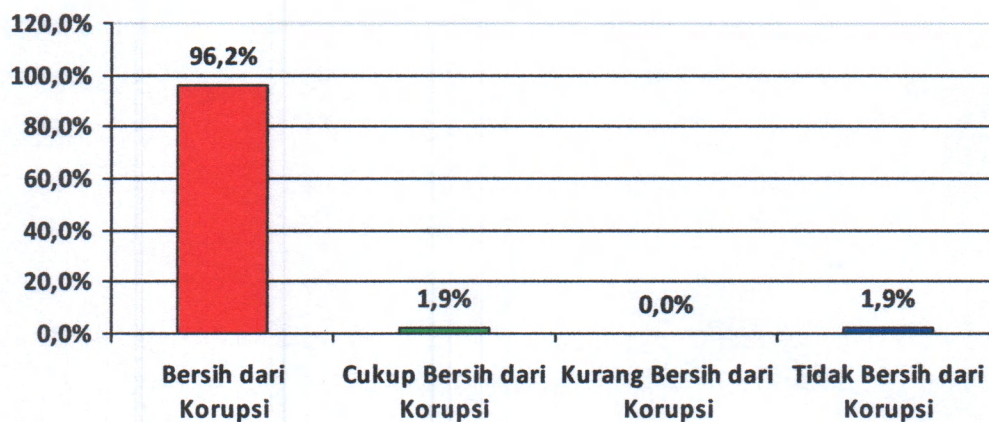
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,923

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	50	96,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	1	1,9
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



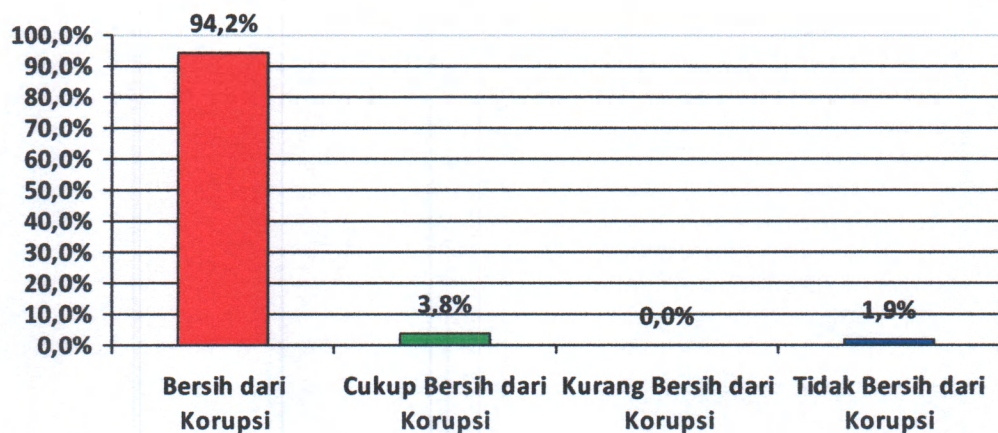
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,904

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

Tabel 11.
Indeks pada indikator biaya tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0

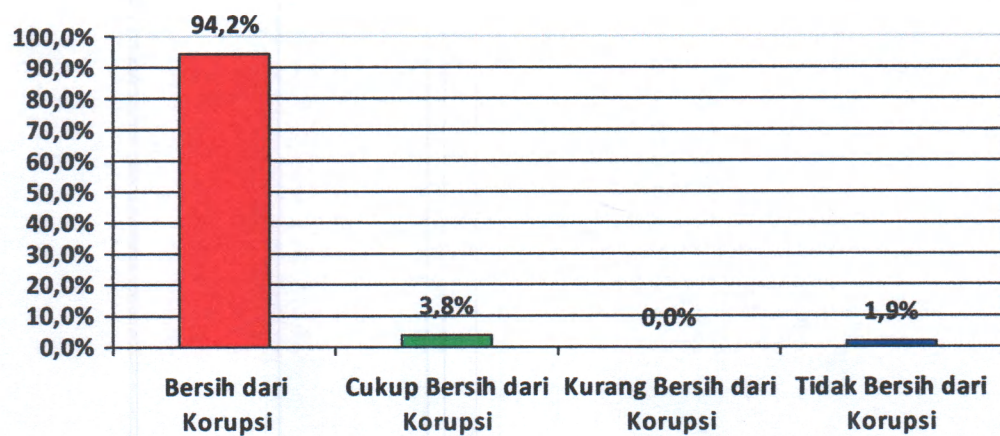


3.2.6. Indikator Hadiah.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,904 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

Tabel 12.
Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

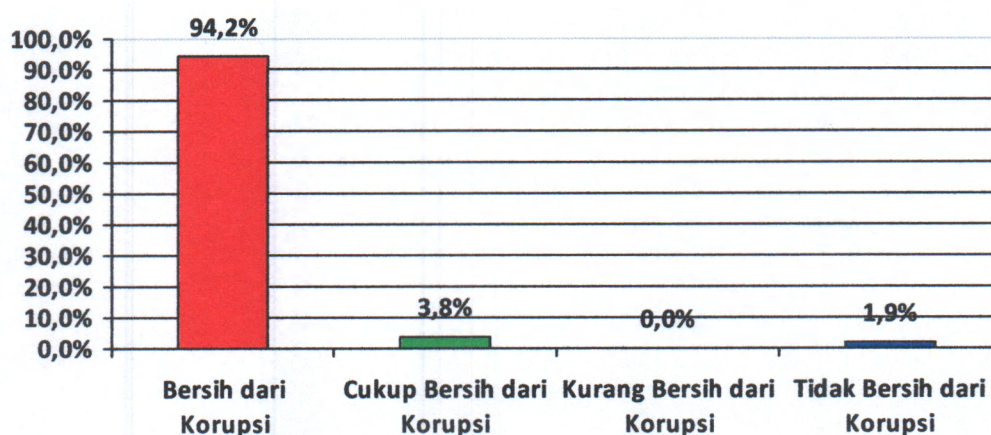
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,904

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0

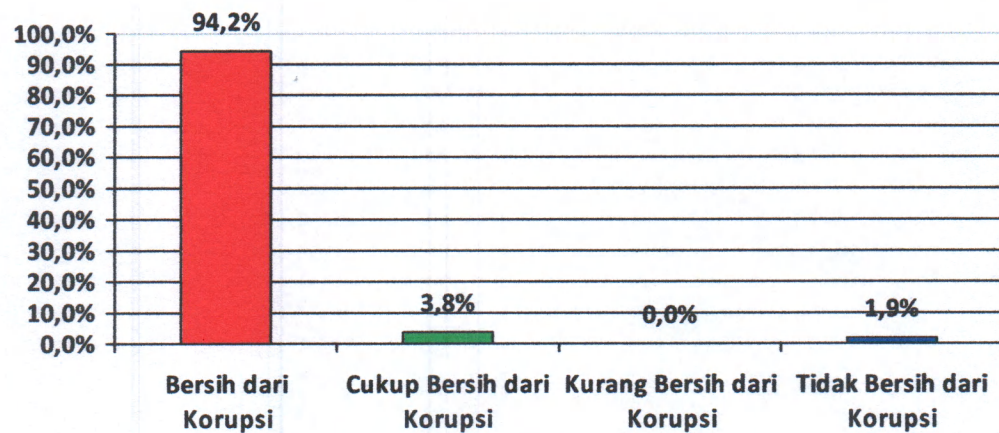


3.2.8. Indikator Percaloan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,904 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.
Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang.

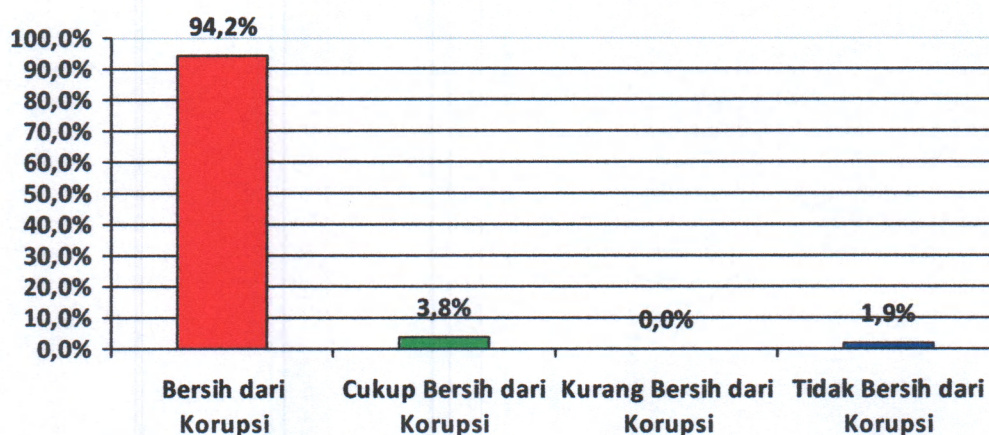
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,904

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

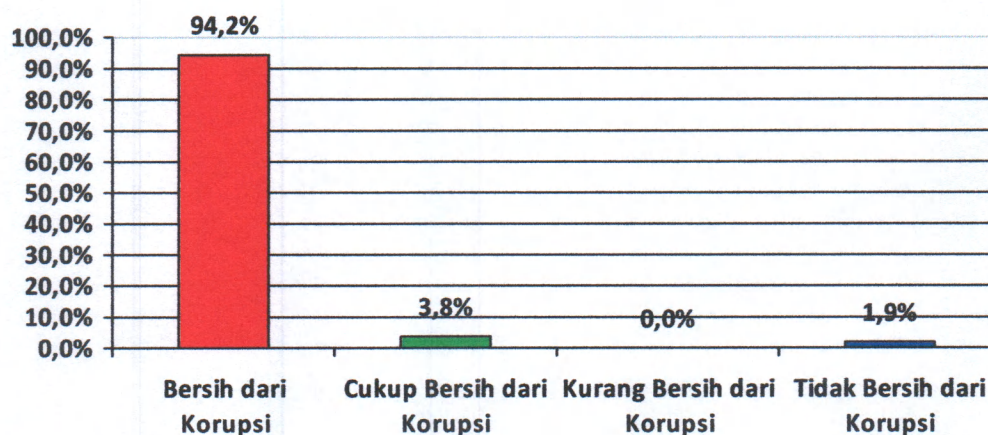
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,904

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	49	94,2
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	2	3,8
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	1	1,9
Jumlah			52	100.0



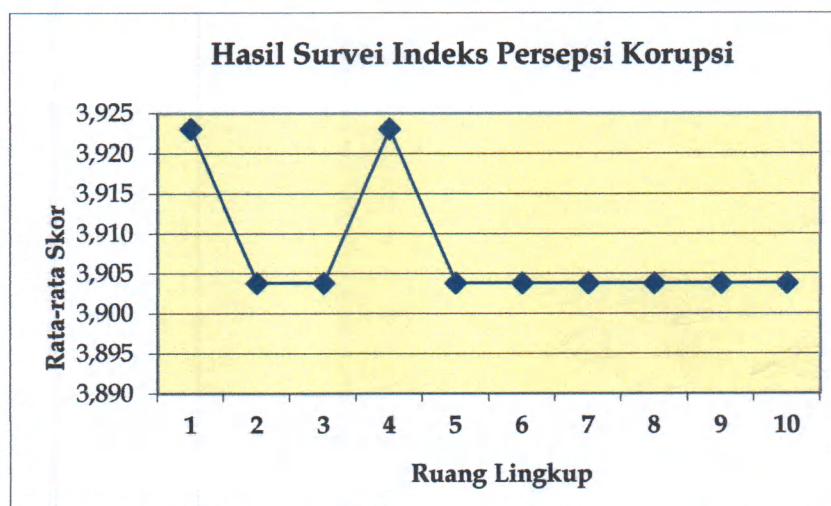
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebesar 93,27.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Ket	Indikator										
	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percaloon	Perbuatan Curang	Transaksi Rahasia	
Jumlah	204	203	203	204	203	203	203	203	203	203	
NRR per RL	3.923	3.904	3.904	3.923	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	3.904	
NRR Tertimbang	0.392	0.390	0.390	0.392	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390	3,908
NILAI PERSEPSI KORUPSI											97,69



Indeks 97,69 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00

Tabel 18.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidakbersih darikorupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja
pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 19.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri
1	Agar biaya yang diperlukan untuk setiap jenis pelayanan bisa diakses secara publik dan transparan

2	Agar informasi perkara secara online lebih disosialisasikan.
3	Agar prosedur pelayanan lebih diperjelas.
4	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang dikenakan agar lebih ditekankan.
5	Agar syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, bisa lebih dipermudah.
6	Agar penegakan hukum dalam penanganan korupsi lebih ditingkatkan.

3.5. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarakan. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, yang diusulkan responden, adalah sebagai berikut :

1. pelayanan ramah
2. layanan ramah
3. pelayanan ramah
4. pelayanan ramah
5. layanan ramah
6. layanan ramah
7. layanan ramah
8. pelayanan ramah
9. pelayanan ramah
10. Layanan ramah
11. pelayanan ramah
12. Layanan Ramah
13. TERIMA KASIH
14. pelayanan ramah
15. Layanan ramah
16. pelayanan ramah
17. TERIMA KASIH
18. PELAYANANNYA RAMAH
19. Pelayanan bagus dan ramah
20. pelayanan pengajuan magang untuk surat masuk ke PTSP Umum sangat mudah
21. Persyaratan pelayanan Salinan sangat memuaskan
22. baik
23. baik
24. sudah sangat baik
25. istimewa
26. istimewa

27. PELAYANAN UNTUK SURAT BESUK LAPAS CUKUP CEPAT DAN DILAYANAI DENGAN BAIK
28. TERIMA KASIH
29. TERIMA KASIH
30. pelayanannya ramah
31. Pegawai yang melayani sangat ramah
32. Dilayani dengan sepenuh hati
33. Pelayanan sangat memuaskan
34. Pelayanan Surat Kuasa sangat profesional
35. Pelayanan mudah diakses
36. Pelayanan melalui WA PTSP Online sangat memudahkan
37. Pelayanan Surat Keterangan sangat mumpuni
38. Pelayanan PTSP sesuai Prosedur, mantap!
39. Kegiatan sangat mantap
40. Penerimaan Surat Keterangan sangat mudah
41. PN Kabupaten mantap!!!!
42. PTSP Perdata sangat mantap!!!
43. Kepangurusan Legalisir Surat Kuasa sangat mantap!!!
44. Pelayanan Surat Kuasa mantap!!!
45. Sangat memuaskan!!
46. Petugas PTSP Pidana sangat ramah
47. petugasnya ramah
48. petugas informasinya ramah
49. petugas informasinya ramah
50. petugas informasinya ramah
51. pelayanannya cepat
52. petugasnya ramah

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab.Kediri diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri memiliki Indeks Persepsi Korupsi 97,69 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,923
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,904
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,904
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,923
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,904
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,904
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,904
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,904
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,904
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,904

Adapun nilai terkecil dan terendah dari penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diantaranya yaitu:

- Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tertinggi terdapat pada:
 1. Kesesuaian prosedur sesuai ketentuan yang berlaku? dengan nilai rata-rata 3,923 kategori sangat baik;
 2. Kemudahan mendapat informasi tentang tarif/biaya melalui website atau petugas layanan pengadilan ?, dengan nilai rata-rata 3,923 kategori sangat baik.
 3. Penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan tertentu?, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik

- Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Terendah terdapat pada:
 1. Penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan tertentu?, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik
 2. Pernah dihubungi seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik.
 3. Selalu membayar tarif resmi tanpa biaya tambahan ?, dengan nilai rata-rata 3,904 kategori sangat baik.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri Tahun 2023 bulan Oktober - Desember tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 97,69 atau masuk pada persepsi 81,26 – 100,00 Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks tinggi semua.

LAMPIRAN

ANALISIS DATA SPAK TRIWULAN IV
BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2023
DENGAN NILAI INDEKS 3.91 / 97.69 %

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	1	1.9	1.9	3.8
	4.00	50	96.2	96.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00002

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00003

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	1	1.9	1.9	3.8
	4.00	50	96.2	96.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00005

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00006

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00007

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

VAR00008

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

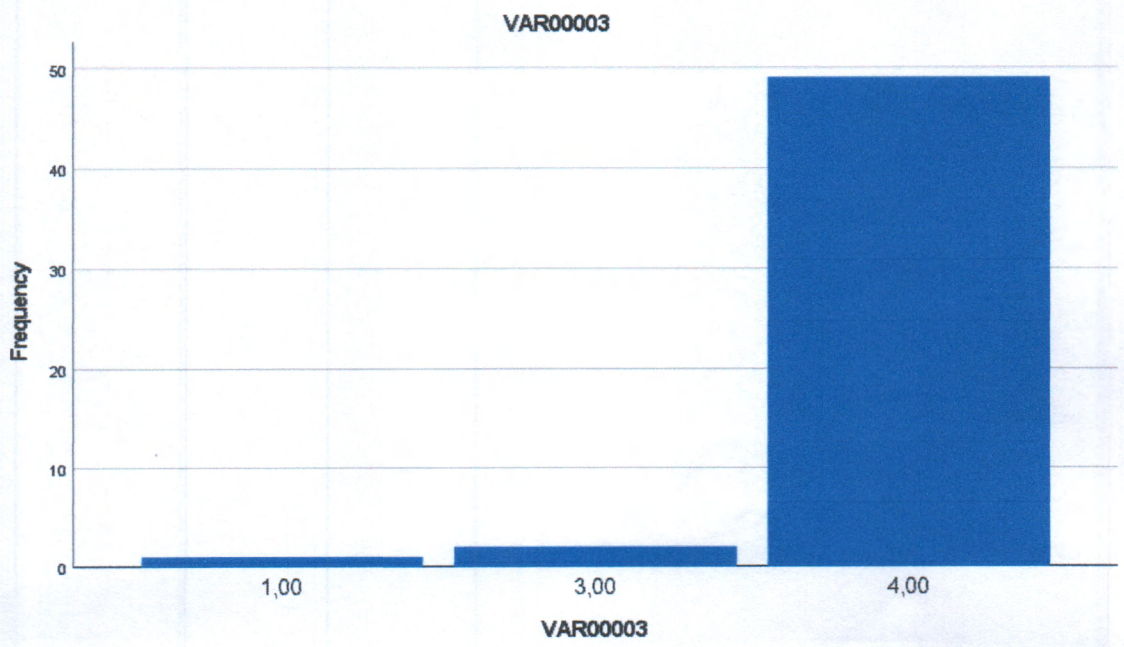
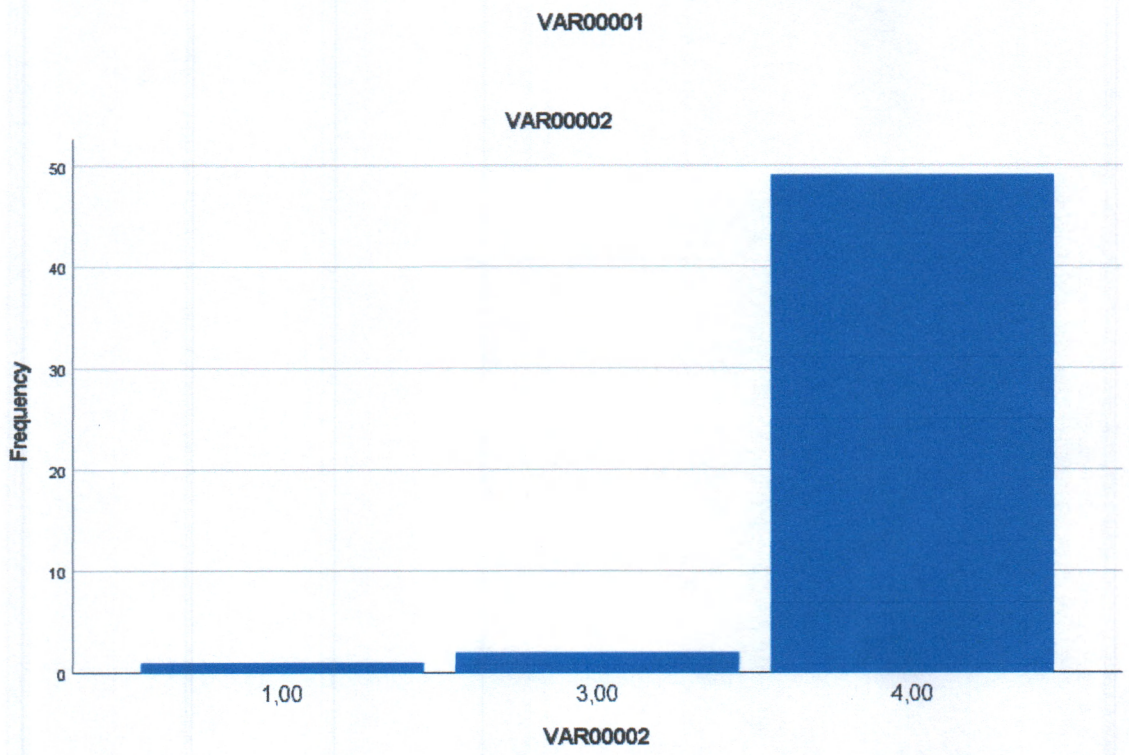
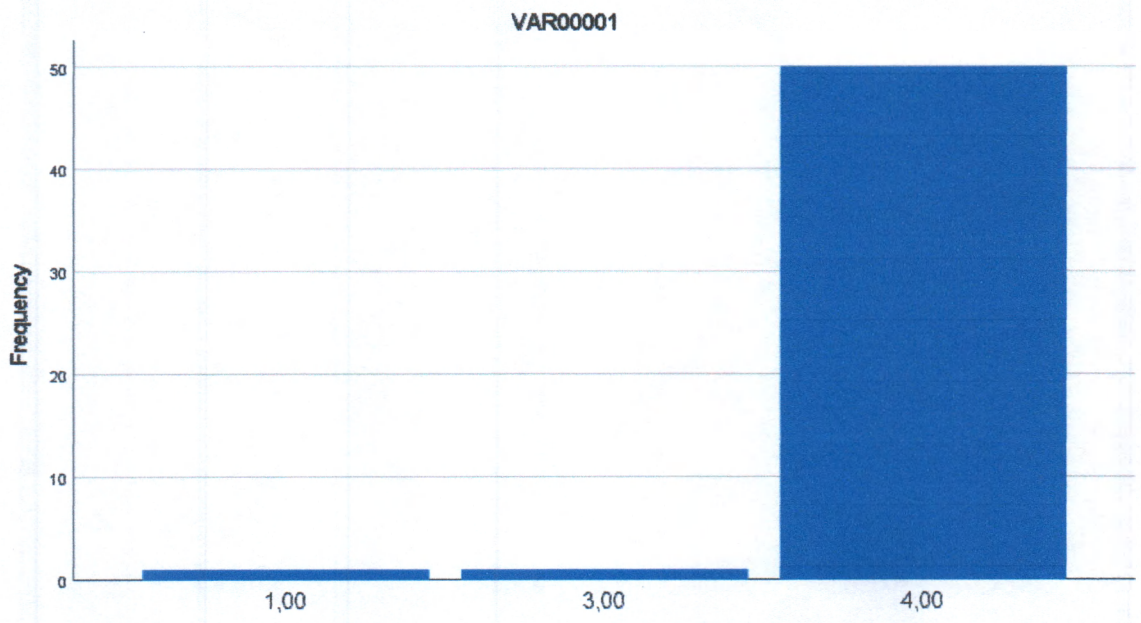
VAR00009

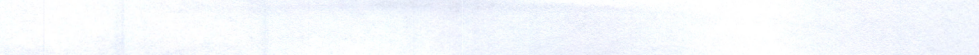
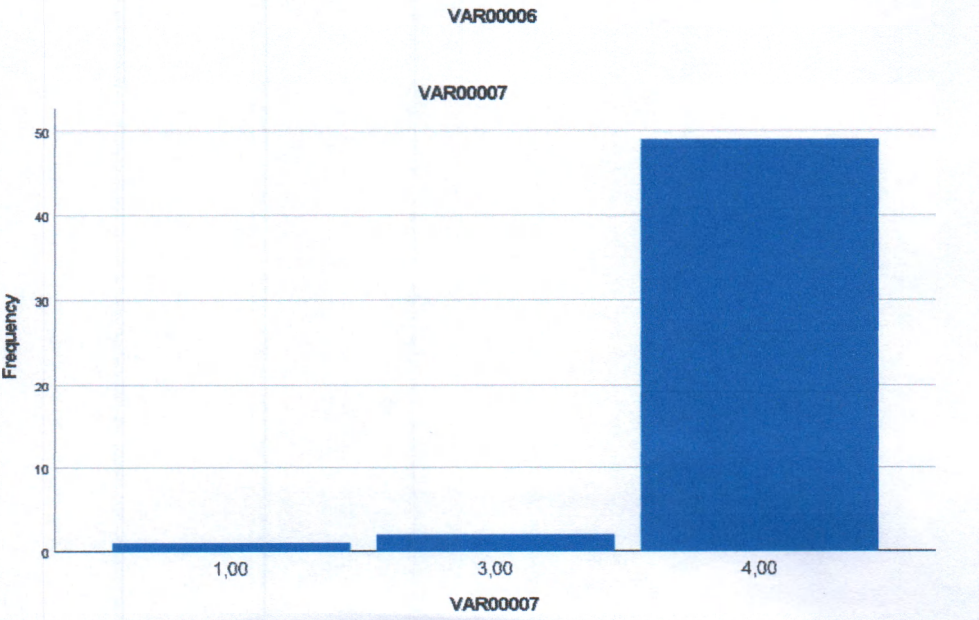
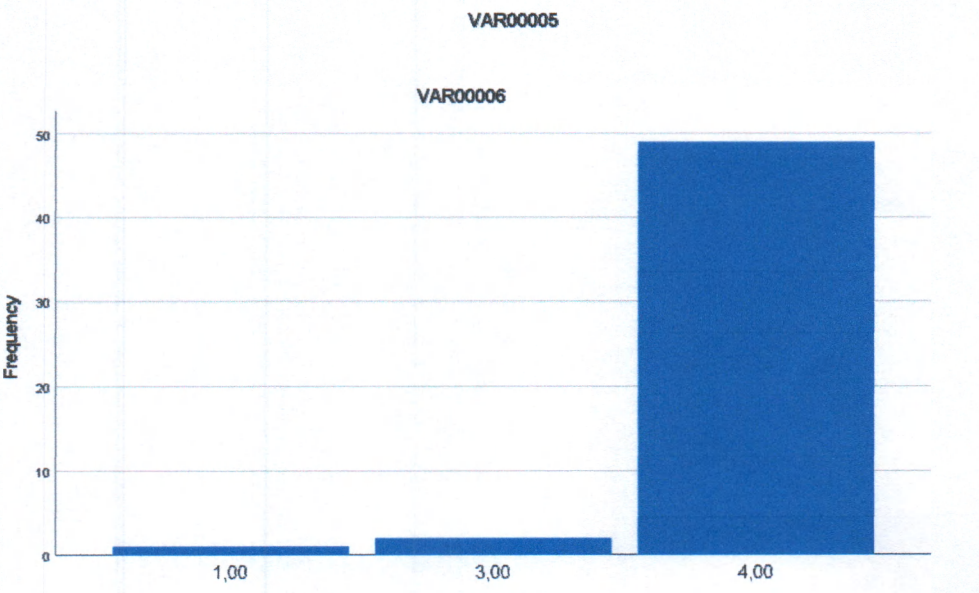
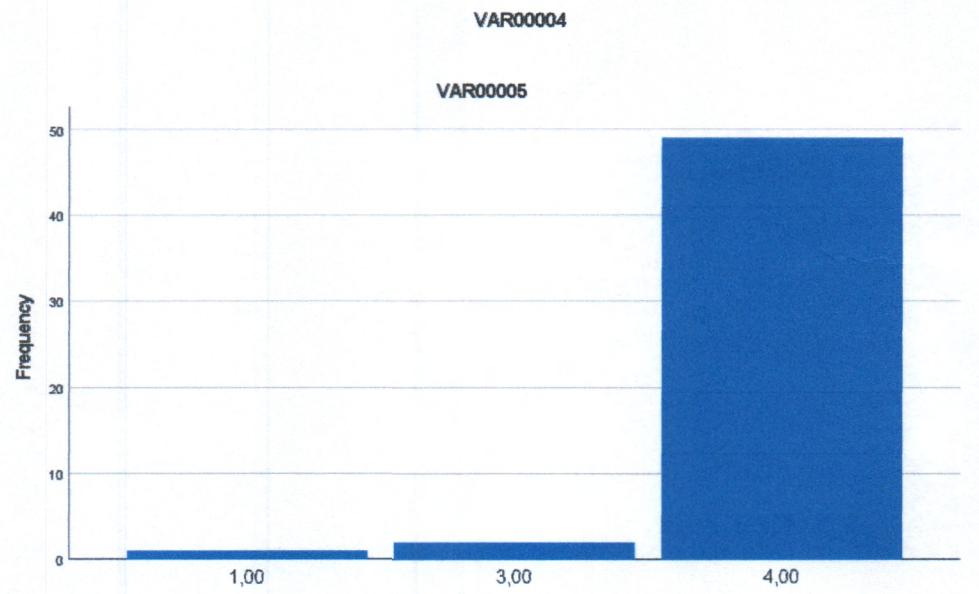
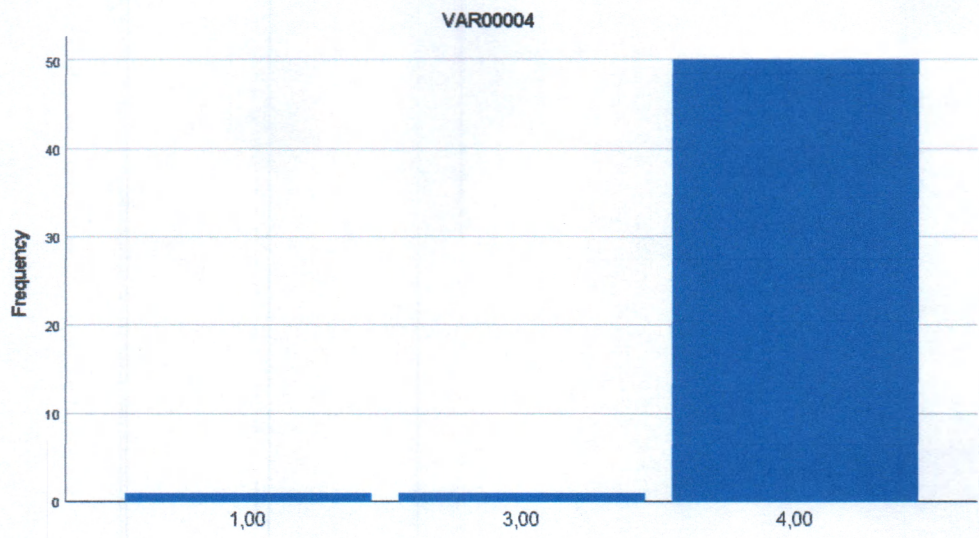
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

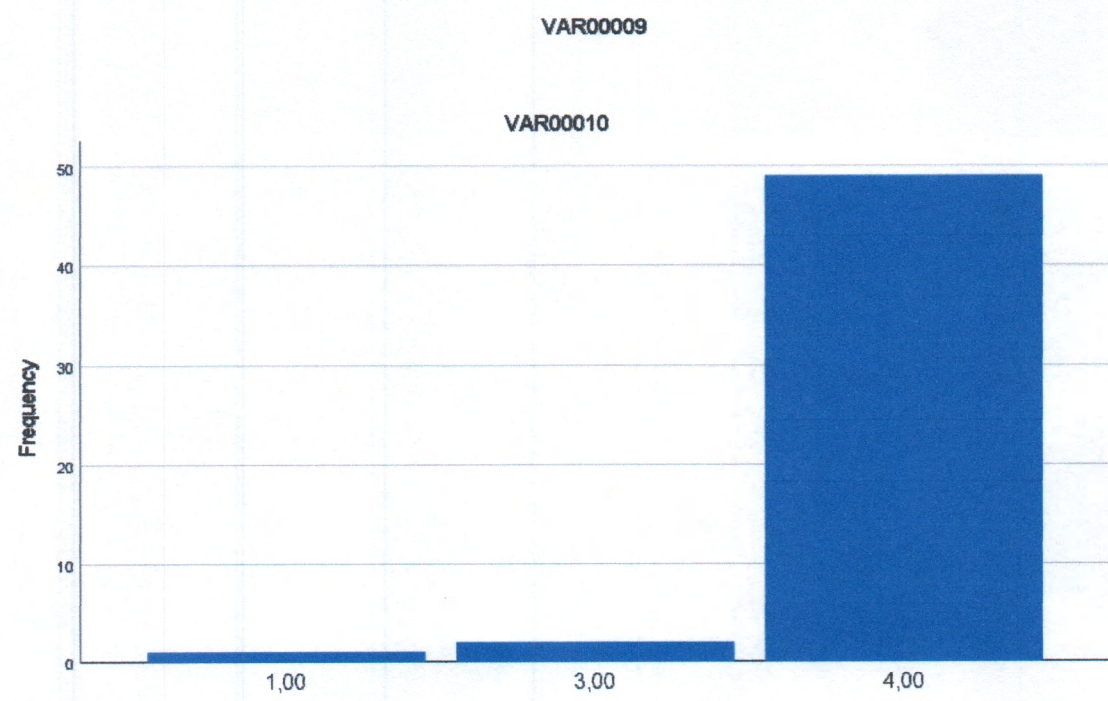
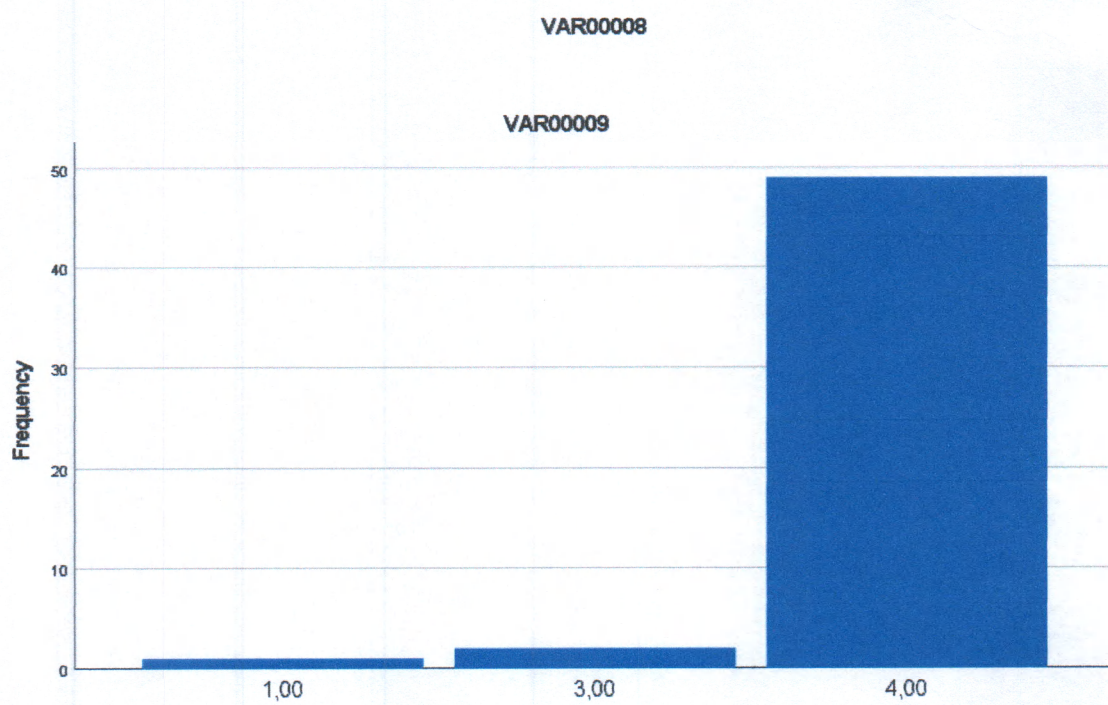
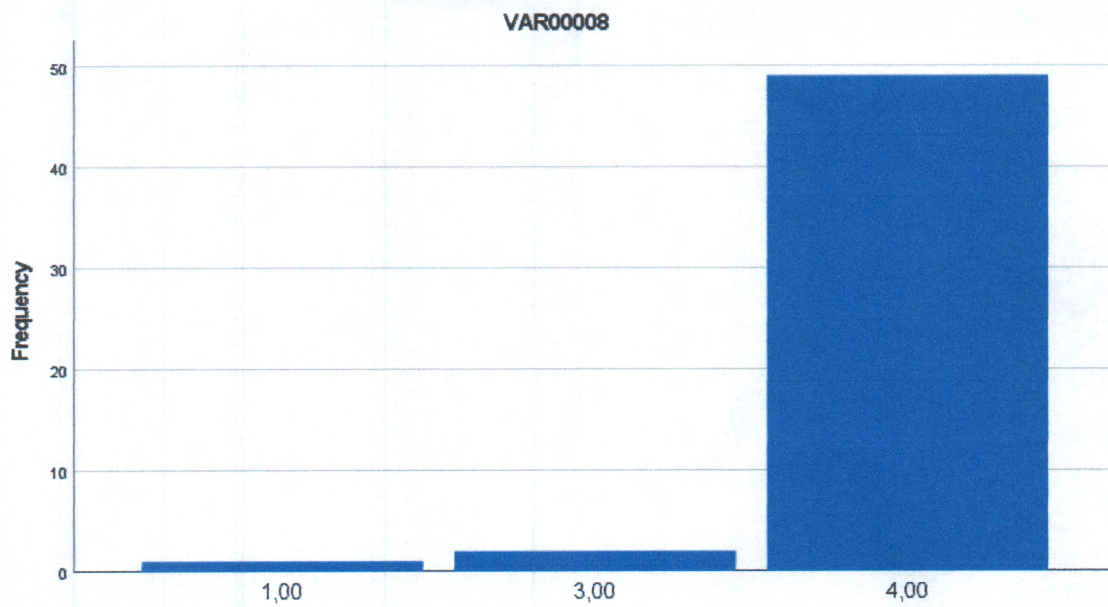
VAR00010

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.9	1.9	1.9
	3.00	2	3.8	3.8	5.8
	4.00	49	94.2	94.2	100.0
Total		52	100.0	100.0	

Bar Chart







VAR00010

146											
147											
148											
149											
150											
Jumlah	204	203	203	204	203	203	203	203	203	203	
NRR per RL	3,923	3,904	3,904	3,923	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	3,904	
NRR Tertimbang	0,392	0,390	0,390	0,392	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	3,908
NILAI PERSEPSI KORUPSI											97,69

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Persepsi Korupsi
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Persepsi Korupsi
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Indikator dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per Indikator x (1/10)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI : 97,69
Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nilai Persepsi Korupsi :

- 4 (Bersih dari Korupsi) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
- 3 (Cukup Bersih dari Korupsi) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
- 2 (Kurang Bersih dari Korupsi) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
- 1 (Tidak Bersih dari Korupsi) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

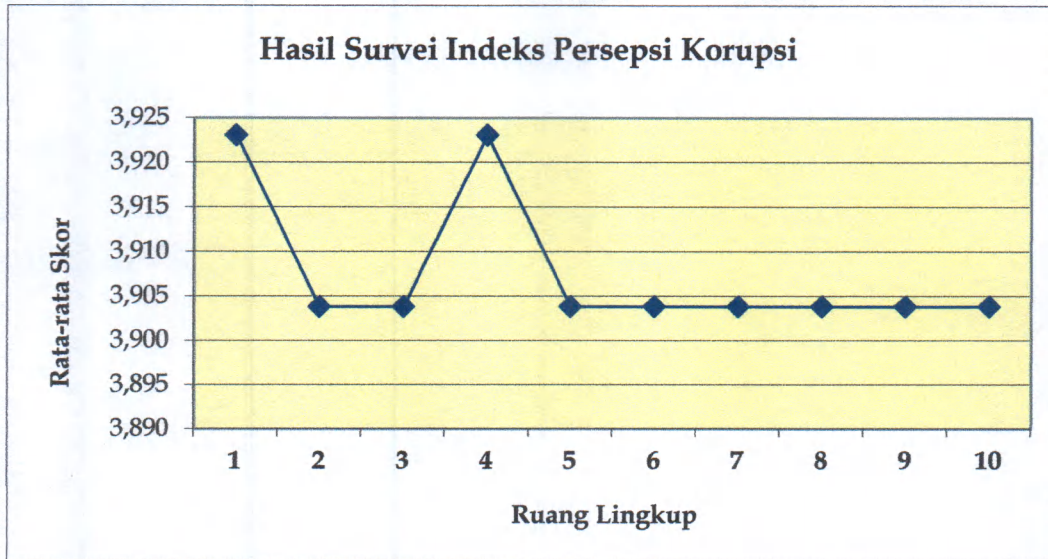
Tabel

RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

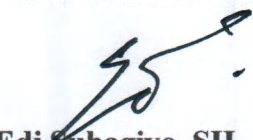
Survey Indeks Persepsi Korupsi:
97,69 **Kategori: BERSIH DARI KORUPSI**

Nomor	Ruang Lingkup / Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,923	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,904	Sangat Baik	3
3	Menjual Pengaruh	3,904	Sangat Baik	3
4	Transaksi Biaya	3,923	Sangat Baik	1
5	Biaya Tambahan	3,904	Sangat Baik	3
6	Hadiah	3,904	Sangat Baik	3
7	Transparansi Biaya	3,904	Sangat Baik	3
8	Percaloan	3,904	Sangat Baik	3

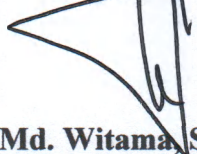
9	Perbuatan Curang	3,904	Sangat Baik	3
10	Transaksi Rahasia	3,904	Sangat Baik	3



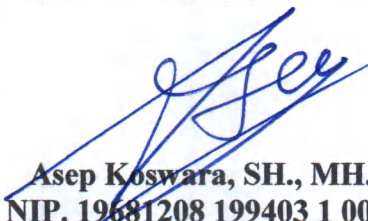
KETUA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS


Edi Subagiyo, SH., MH.
 NIP. 19740615 199303 1 001

KETUA TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI


I. Md. Witama, SH.
 NIP. 19660731 199303 1 003

**PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**


Asep Koswara, SH., MH.
 NIP. 19681208 199403 1 001